

Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19

Agile Governance Of Tulungagung District Health Office In Handling Covid-19

Winda Kusumawati* & Arimurti Kriswibowo

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Diterima: 23 Mei 2021 Direview: 23 Mei 2021; Disetujui: 08 Agustus 2021

*Corresponding Email: kusumawinda99@gmail.com

Abstrak

Memasuki bulan November 2020, kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung terjadi lonjakan diiringi dengan angka kematian yang juga ikut melonjak. Konsep *Agile Governance* merupakan suatu cara untuk menata tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya yang terdiri dari *value proposition* dan *agility shift*, karakter pemimpin yang siap akan perubahan, pendekatan *citizen centric*, dan investasi SDM. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui respon secara cepat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung terhadap perubahan-perubahan tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Didik Eka S.P., S.Km., M.Si. sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan pihak-pihak lain terkait dan diperoleh melalui wawancara. Kemudian sumber data sekunder, yaitu dokumentasi dan angket, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung merespon cepat terhadap penanganan COVID-19 dan dapat berjalan dengan menerapkan konsep *Agile Governance*.

Kata Kunci: Covid-19; Respon; *Agile Governance*.

Abstract

Entering November 2020, the Covid-19 case in Tulungagung Regency has spiked, accompanied by a soaring death rate. The concept of *Agile Governance* is a way to organize better governance by paying attention to the principles in it consisting of a *value proposition* and *agility shift*, the character of a leader who is ready for change, a *citizen centric* approach, and human resource investment. This research is interesting to study because researchers want to know the quick response made by the Tulungagung District Health Office to unexpected changes in meeting the demands and needs of the community due to the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this study using primary and secondary data. As for the primary data source in this study were Mr. Didik Eka S.P., S.Km., M.Si. as Head of the P2P Division of the Tulungagung Regency Health Office and other related parties and obtained through interviews. Then the secondary data sources, namely documentation and questionnaires, literature, articles, journals, and sites on the internet relating to the research conducted. The results of this study are that the Tulungagung District Health Office responds quickly to the handling of COVID-19 and can run by applying the concept of *Agile Governance*.

Keywords: Covid-19; Response; *Agile Governance*

How to Cite: Kusumawati, W., & Kriswibowo, A., (2021). *Agile Governance* Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(2): 757-766.



PENDAHULUAN

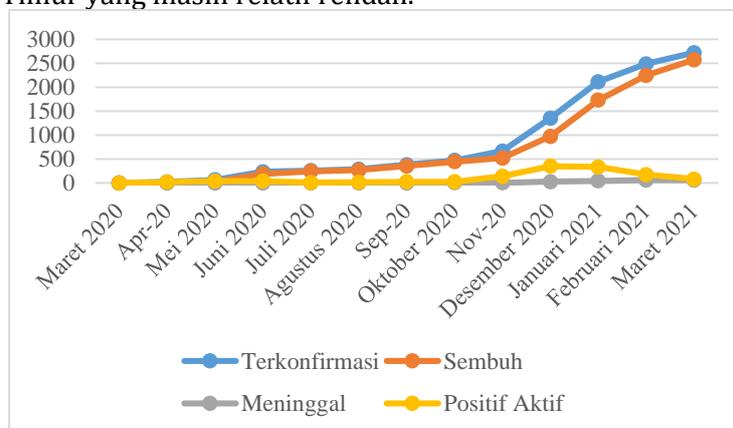
Pada tahun 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang tertular virus COVID-19. Secara *historical context*, Covid-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020). Dalam merespon masuknya virus Covid-19 ke Indonesia diperlukan langkah-langkah yang responsif, cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis. Hal ini diperlukan kondisi tanggap darurat dalam keterbatasan untuk mencapai kestabilannya. Melihat pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus mengalami peningkatan serta meluasnya cakupan wilayah yang terpapar virus COVID-19, Indonesia yang pada awalnya merasa terbebas dari COVID-19, juga tidak dapat membentengi diri dari serangan virus mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama kali oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 kemudian terus menyebar ke seluruh Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya (Winanti, 2020). Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 dan menetapkan bencana nonalam akibat penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagai bencana nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020. Peningkatan penularan Covid-19 masih terasa di awal tahun 2021. Kenaikan penularan Covid-19 juga diiringi dengan peningkatan jumlah angka kematian pasien. Bahkan Indonesia telah masuk ke urutan 12 tertinggi di dunia.

Tabel 1. Lima Besar Jumlah Kumulatif Pasien Covid-19 Indonesia Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Terkonfirmasi	Dirawat	Sembuh	Meninggal
DKI Jakarta	379.691	7.775	365.600	6.316
Jawa Barat	246.788	24.176	219.475	3.137
Jawa Tengah	167.276	35.972	124.189	7.115
Jawa Timur	138.706	5.866	123.310	9.530
Kalimantan Timur	63.091	3.382	58.220	1.489

Sumber: <https://m.antaranews.com/covid-19>

Berdasarkan Tabel 1, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan angka positif Covid-19 peringkat 4 dan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi se-Indonesia dengan 9.530 orang per tanggal 6 April 2021. Hal ini bisa terjadi karena kurang tanggapnya pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 ini. Tingginya tingkat kematian akibat Covid-19 di Jawa Timur juga disebabkan karena penderita virus terlambat untuk mendapatkan perawatan Rumah Sakit. Penyebab lainnya adalah dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Jawa Timur yang masih relatif rendah.



Gambar 1. Kondisi Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Tulungagung

Sumber: Ig: Jatimpemprov (2020-2021)

Berdasarkan Gambar 2, pada awal munculnya Covid-19 yaitu bulan Maret 2020 di Kabupaten Tulungagung terdapat 1 orang terkonfirmasi virus Covid-19. Kemudian pada bulan April 2020 terdapat 22 terkonfirmasi dan ada 4 orang yang sembuh. Pada bulan Mei 2020, 64 orang terkonfirmasi kemudian 22 orang sembuh sehingga menyisakan 41 orang dalam perawatan dan untuk pertama kalinya ada kasus kematian akibat Covid-19 1 orang. Pada bulan Juni 2020 terdapat 235 orang terkonfirmasi, 193 orang sembuh sehingga menyisakan 39 orang masih dalam perawatan, dan kemudian kasus kematian akibat covid menjadi bertambah yaitu 3 orang. Pada bulan Juli 2020 terdapat 257 terkonfirmasi dan ada 245 orang yang sembuh sehingga menyisakan 9 orang masih dalam perawatan. Pada bulan Agustus 2020 288 terkonfirmasi dan ada 268 orang yang sembuh sehingga menyisakan 17 orang masih dalam perawatan. Pada bulan September 2020 terdapat 383 terkonfirmasi dan ada 356 orang yang sembuh sehingga menyisakan 24 orang masih dalam perawatan. Pada bulan Oktober 2020 terdapat 473 terkonfirmasi dan ada 445 orang yang sembuh sehingga menyisakan 24 orang masih dalam perawatan, kemudian kasus kematian bertambah 1 menjadi 4 untk saat ini. Pada bulan November 2020 terdapat 668 terkonfirmasi dan ada 520 orang yang sembuh sehingga menyisakan 141 orang masih dalam perawatan, kemudian kasus kematian juga bertambah menjadi 7 orang. Pada bulan Desember 2020 terdapat 1354 terkonfirmasi dan ada 973 orang yang sembuh sehingga menyisakan 353 orang masih dalam perawatan serta kasus kematian naik drastis menjadi 28 orang. Meningkatnya secara drastis ini membuat sempat menjadi dilemma untuk lokasi bencana tersebut. Pada bulan Januari 2021 terdapat penambahan kasus covid-19 yaitu 2112 terkonfirmasi dan ada 1731 orang yang sembuh sehingga menyisakan 335 orang masih dalam perawatan bahkan dalam tingkat kematiannya juga tinggi yaitu: Pada bulan Februari 2021 terdapat penambahan kasus covid-19 yaitu 2486 terkonfirmasi dan ada 2247 orang yang sembuh sehingga menyisakan 334 orang masih dalam perawatan bahkan dalam tingkat kematiannya juga tinggi yaitu 62 orang. Maret 2021 terdapat penambahan kasus covid-19 yaitu 2718 terkonfirmasi dan ada 2572 orang yang sembuh sehingga menyisakan 83 orang masih dalam perawatan bahkan dalam tingkat kematiannya juga tinggi yaitu 62 orang.

Grafik penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung awalnya dianggap biasa, karena jumlah kasus tiap harinya belum ada atau bisa dikatakan tidak beresiko. Masyarakatpun cenderung tidak memperdulikan akan bahaya Covid-19 karena dianggap Kabupaten Tulungagung aman dari virus ini. Seiring berjalannya waktu, kasus Covid-19 menyebar dengan sangat cepat. Memasuki bulan November 2020, kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung terjadi lonjakan diiringi dengan angka kematian yang juga ikut melonjak. Banyaknya kegiatan masyarakat seperti hajatan, reuni, resepsi pernikahan dll. juga merupakan hal-hal yang dapat memicu lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Melonjaknya jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, mengakibatkan tempat karantina pasien Covid-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung penuh. Jumlah pasien yang menjalani karantina di Rusunawa IAIN Tulungagung terus bertambah sejak pertengahan November. Puncaknya pada tanggal 28 November, di mana dalam sehari ada 65 pasien Covid-19 masuk ke gedung karantina, dikutip dari (CNN, 2020). Tambahan kasus baru COVID-19 itu terbanyak sepanjang pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, birokrasi menjadi institusi yang penting dan dominan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk dapat menempatkan diri dalam situasi darurat yang penuh dengan ketidakpastian. Tahun 2007, muncul sebuah konsep *Agile Governance* sebagai tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru (Luna, Kruchten, Pedrosa, Neto, & Moura, 2014). Konsep *Agile Governance* merupakan suatu cara untuk menata tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Konsep *Agile Governance* lebih mengarah pada bagaimana supaya pemerintah bisa gesit dalam merespon perubahan itu sendiri.

Dalam penelitian sebelumnya milik Muhammad Taufiq Hatta Wibowo, Ami Afriyani dengan judul "Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang" pada tahun 2021 memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis sejauh mana strategi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID-19 di wilayah



Kabupaten Sumedang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang (Pratama, Purwanti, & Wibowo, 2018).

Kemudian pada penelitian yang diteliti oleh Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina dengan judul “Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19” pada tahun 2020 menjelaskan bahwa birokrasi yang lincah (*agility bureaucracy*) dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 mutlak diperlukan. Dalam implementasinya, terdapat tiga tantangan, yakni tantangan birokrasi untuk berubah dan bergerak cepat; tantangan fleksibilitas; dan ketidakjelasan informasi serta ketidaksinkronan data. Untuk menjawab tantangan tersebut, agilitas birokrasi dapat dilakukan dengan mengubah *upfront planning* menjadi *incremental planning*. Tulisan ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini DPR perlu memastikan pemerintah telah menyusun kebijakan yang baik dan tepat, dengan menetapkan kriteria kebijakan dan indikator keberhasilannya. Di samping itu, DPR perlu menyusun rancangan undang-undang tentang *e-government (e-gov)*, sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi Indonesia (Amrynudin & Riris, 2020).

Dalam menanggulangi Covid-19 didasarkan pada UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah sebagai tumpuan utama ada pada Kabupaten/ Kota sebagai pelayanan publik. Dalam hal ini, penyedia layanan yang berhubungan erat dalam penanganan COVID-19 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui respon secara cepat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung terhadap perubahan-perubahan tak terduga dengan antisipasi dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji bagaimana strategi yang dilakukan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini memiliki 4 tujuan. Pertama, mengetahui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dapat merumuskan *value proposition* dan *agility shift*. Kedua, mengetahui kesiapan karakter Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung akan perubahan akibat pandemi Covid-19. Ketiga, mengetahui pendekatan *citizen centric* yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Keempat, Mengetahui Investasi SDM yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Agile Governance* Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam Menangani COVID-19”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam terkait permasalahan. Dalam penelitian *Agile Governance* Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam Menangani COVID-19 ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Hardani et al. (2020), data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, wawancara, observasi dan lain-lain. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, buku pedoman, profil atau pustaka (Hardani et al., 2020). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Didik Eka S.P., S.Km., M.Si. sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan pihak-pihak lain terkait dan diperoleh melalui wawancara. Kemudian sumber data sekunder, yaitu dokumentasi dan angket, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan *CAPi* serta dokumentasi (Hardani et al., 2020) agar mendapatkan data yang relevan dan sekaligus lebih jelas dan detail. Fokus dalam penelitian ini

adalah penerapan prinsip-prinsip *Agile Governance* Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam menangani Covid-19. Penelitian mengambil setting di Kabupaten Tulungagung dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki grafik angka kasus Covid-19 yang naik turun. Dalam penelitian ini menggunakan teori 4 Prinsip *Agile Governance* (Purwanto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, publik sudah semakin sadar bahwa negara memerlukan perubahan. Pemerintah merupakan aktor utama yang harus menyesuaikan diri untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 (Amalia, 2020). Dengan konsep *Agile governance* ini pemerintah tahu cara melakukan identifikasi masalah mulai dari faktor penyebab, ciri, bentuk, akibat sampai pada akar masalah (tata kelola), setelah itu akan ditemukan peluang apa saja yang bisa diambil dan cara atau metode taktis dan strategis apa saja yang diaplikasikan untuk menindaklanjutinya (Firhansyah, 2021). Yang membuat konsep *agile governance* ini berbeda adalah bisa melakukan tindak lanjut dengan waktu relatif singkat dan menggunakan semua aspek perubahan efektif, terlebih lagi dampak dari hasilnya perlahan dapat dirasakan. Pada intinya konsep agile tak cukup hanya konsep membangun pemimpin tetapi bagaimana menciptakan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan cerdas. SDM yang kompeten, serta menyusun program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil yang maksimal. Birokrasi yang lincah (*agility bureaucracy*) dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 mutlak diperlukan (Amrynudin & Riris, 2020). Dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah dapat menciptakan birokrasi publik yang *agile*. Ada prinsip-prinsip yang harus dipahami bagi birokrasi publik ketika menerapkan paradigma *agile* ini. Prinsip ini menjelma menjadi prakondisi yang harus dipenuhi oleh birokrasi untuk berubah.

Value Proposition dan Agility Shift

Pada Bulan Januari 2020, Didik Eka dalam (Liputan 6, 2020) mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memberlakukan status siaga terhadap potensi penyebaran Virus Covid-19 dengan memantau seluruh pasien yang menderita demam tinggi akibat gejala pneumomia di seluruh puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Jika ada pasien yang memiliki gejala tertular virus covid-19 agar dirujuk ke RSUD dr. Iskak. Perintah kesiapsiagaan itu sendiri berawal dari tindak lanjut surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan tentang kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyakit menular pneumonia dari negara Republik Rakyat Tiongkok (China) ke Indonesia. Walaupun pada bulan Januari 2020 Kabupaten Tulungagung belum ada kasus pasien yang terpapar virus covid-19, Dinas Kesehatan menegaskan agar tetap akan waspada. Selain melakukan deteksi dini melalui klinik, rumah sakit serta jaringan puskesmas yang ada di tingkat desa dan kecamatan, pengawasan juga akan dilakukan bagi penduduk atau warga pendatang yang barusan bepergian dari negara-negara yang telah dinyatakan menjadi sebaran Virus Covid-19 ini.

Awal mula Covid-19 masuk di Kabupaten Tulungagung, secara manusiawai menimbulkan kepanikan baik dari pemerintah maupun masyarakatnya, karena Virus Covid-19 ini tergolong virus baru. Pemerintah Daerah, Dokter dan dari sisi kesehatan masyarakat lainnya masih menganalisa dan mempelajari Virus Covid-19 ini. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berusaha mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk mencari cara terbaik dalam menangani Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebagai OPD penyedia layanan yang berhubungan erat dalam penanganan COVID-19 selalu berkoordinasi dengan tingkat administrasi di atasnya yaitu pemerintah provinsi dan pusat terkait apa yang harus dilakukan. Pemerintah pusat sendiri juga aktif dan senantiasa selalu memberikan arahan. Pemerintah pusat tidak ingin kecolongan disetiap kabupaten/kota ada ledakan yang tidak terkendali.

Setelah masuknya Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, kemudian keluarlah Keputusan Bupati Nomor 106 tahun 2020 tentang status Siaga darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease di Kabupaten Tulungagung dengan tenggang waktu hanya 2 minggu. Kemudian keluar lagi Keputusan Bupati Nomor 122, 173, 220, 254 tahun 2020 tentang status Siaga darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease di Kabupaten Tulungagung yang memiliki masing masing masa tenggang waktu 1 bulan. Karena terlalu sering membuat keputusan setiap bulannya dan pandemi tak



kunjung berakhir akhirnya keluarlah Keputusan Bupati Nomor 288 tahun 2020 tentang status Siaga darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease di Kabupaten Tulungagung dengan jangka waktu hingga pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir secara nasional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung kemudian membuat telaah staff (masuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung) kepada Bupati Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi adanya KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional berupa pembentukan posko dan Satgas penanganan Covid-19 yang beranggotakan dari tenaga kesehatan. Kemudian dengan adanya itu ada perintah setiap Kabupaten/Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten yang SDM didalamnya lebih luas. Setelah dibentuk Gugus Tugas, kemudian dibuatlah rencana kerja dsb. Kemudian Dinas Kesehatan merapatkan cara penanganan Covid-19 mulai dari 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*), serta merencanakan penatalaksanaan dalam melakukan 3T.

Dalam menangani Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyiapkan RS Rujukan untuk penderita Covid-19 berat, tempat karantina yaitu rusunawa IAIN Tuungagung, menyiapkan 3 puskesmas penyangga yaitu Puskesmas Beji, Puskesmas Bangunjaya dan Pukesmas Kalidawir serta membentuk tim tracing dan testing yang kuat dan mobil. Disiapkannya 3 Puskesmas penyangga agar RSUD masih bisa fokus pada penanganan pasien non covid-19. Dalam kaitannya dengan penyediaan informasi terkait kasus perkembangan Covid-19 dilakukan dengan baik, bahkan petugas aktif dalam membalas komentar atau menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Akhirnya Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu dari sedikit daerah di Jawa Timur yang lebih dulu keluar dari status zona merah karena mampu mengendalikan sebaran kasus baru COVID -19 sejak terjadinya lonjakan kasus pada bulan Oktober-Desember Penyebaran Virus Covid-19 (Sujarwoko, 2021). Kasus penyebaran Virus Covid-19 tetap bertambah tetapi dapat dikatakan cukup terkendali. Masih banyaknya temuan kasus baru ini pun tak lepas dari penelusuran kasus kontak erat dari pasien konfirmasi sebelumnya yang berjalan efektif. Minimal 20-30 orang yang diidentifikasi yang tinggal di sekitar rumah pasien COVID-19, atau mereka yang pernah terlibat kontak erat (komunikasi minimal 15 menit), langsung dilakukan "*screening*" dengan metode wawancara, serta pemeriksaan fisik sederhana (Sujarwoko, 2021). Cek suhu tubuh, tensi anamnesis kondisi tubuh. Jika ditemukan indikasi bergejala, yang bersangkutan segera dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dengan metode *rapid test* (test cepat) COVID-19, atau yang sekarang menggunakan metode rapid antigen, hingga tes usap PCR di klinik COVID-19 yang ada di RSUD dr. Iskak Tulungagung. Dan apabila hasilnya dinyatakan positif COVID-19, yang bersangkutan akan direkomendasikan sesuai kondisi gejala yang dialami, baik di puskesmas rawat inap COVID-19 (yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi RS darurat COVID-19) untuk yang bergejala ringan, maupun di rumah sakit (RSUD dr. Iskak atau RS Bhayangkara selaku rumah sakit rujukan COVID-19 sesuai ketetapan Gubernur Jatim). Untuk yang bergejala namun positif COVID-19 diarahkan ke rumah karantina di Rusunawa IAIN Tulungagung. Tapi jika *tracing*nya negatif, dan tidak ada gejala, maka yang bersangkutan diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Disisi lain juga masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam penanganan Covid-19, beberapa diantaranya adalah perencanaan dari pusat atau top down planning terkadang kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan karena setiap daerah pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kemudian kadang-kadang juga kebijakan dari pusat tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung dengan ketersediaan dana yang ada. Tetapi untuk saat ini semua itu sudah terlewatkan (teratasi). Mindset masyarakat terkait pandemi Covid-19 ini ada yang pro dan kontra. Dinas Kesehatan dijadikan kambing hitam yang katanya mengcovid-kan seseorang. Banyak masyarakat menjadi tidak patuh dengan 3M (Menekan, Mencegah, memutus Rantai). Jika seseorang terkena Covid-19 mereka akan merasa terstigma, jadi banyak yang menyembunyikan diri dan tidak mau isolasi, ada juga yang awalnya perawatan isolasi kemudian meminta pulang paksa dan menjadi menularkan virus ke orang lain.

Karakter Pemimpin yang Siap akan Perubahan

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini karakter pemimpin haruslah siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Pemimpin yang agile memiliki visi yang jelas yang berfokus pada permasalahan baru dan tujuan organisasi yang strategis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung agar virus Covid-19 ini tidak menyebar luas dan berakibat semakin buruk kemudian



membuat telaah staff (masukin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung) kepada Bupati Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi adanya KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional agar segera membentuk posko dan Satgas penanganan Covid-19 yang beranggotakan tenaga kesehatan baik itu dari Dinas Kesehatan, Puskesmas atau bahkan Rumah Sakit. Pada periode bulan Oktober-Desember ketika terjadi ledakan kasus Covid-19, Kepala Dinas Kesehatan mampu bersikap tenang dan kemudian memberikan alternatif penanganan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung kemudian menambah tempat karantina yang awalnya hanya di IAIN Tulungagung ditambah di RUSUWA (Rumah Susun Sewa) Kecamatan Japun. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga meningkatkan status Puskesmas menjadi RSDC (Rumah Sakit Darurat Covid-19). Sembilan puskesmas yang beralih fungsi menjadi RSDC tersebut di antaranya berada di Kauman, Ngunut, Campurdarat, Kalidawir, Pagerwojo, Bangunjaya, Sendang, Gondang dan Beji. Peralihan status puskesmas menjadi RSDC akhirnya mampu menekan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

Sebelum terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yaitu dr. Kasil Rokhmat bersama tim epidemiologinya telah membaca tanda-tanda yang muncul sejak akhir Oktober 2020 (Sujarwoko, 2021). Memasuki Oktober kasus baru mulai bermunculan hingga belasan orang (terkonfirmasi) per hari. Kasus meningkat, yang di-*tracing* secara otomatis semakin banyak. Dari hasil *tracing* itu, sebaran kasus mulai terbaca. Dari sinilah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung beserta tim epidemiologinya dapat memprediksi ledakan kasus akan segera terjadi. Dan ternyata prediksi lonjakan tertinggi berada pada bulan November 2020.

Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres tersebut mencabut Keppres Nomor 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, diganti istilahnya menjadi Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dan Satgas COVID-19 Daerah. Perpres ini mengatur pembentukan Satgas COVID-19 pusat maupun daerah. Dengan begitu, bisa jadi personelnya masih sama, namun istilah dan payung hukumnya berbeda, karena Keppres dicabut diganti Perpres. Di masa pergantian Gugus Tugas menjadi Satgas tersebut, Gugus Tugas COVID-19 Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satgas COVID-19 dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perpres. Saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kini berubah nama menjadi Satgas Penanganan COVID-19.

Berawal dari prediksi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung beserta tim epidemiologinya, dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Tulungagung melakukan pembentukan puskesmas rawat inap COVID-19 yang tersebar di enam kecamatan. Rekomendasi muncul sedari awal tren kenaikan kasus terus terjadi selama periode Oktober. Usulan itupun dengan mudah diterima seluruh unsur Satgas COVID-19 yang dipimpin Bupati Maryoto Birowo. Dengan adanya puskesmas rawat inap COVID-19 dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan rawat inap pasien apabila terjadi ledakan lama puskesmas rawat inap COVID-19 ditetapkan Bupati Tulungagung, jumlah pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit mulai melonjak. Terutama pada periode sepekan sebelum akhir November hingga akhir pertengahan Desember 2020.

Dengan adanya perkiraan lonjakan tersebut, RSUD dr. Iskak telah menambah kapasitas tampung pasien COVID-19, dari sebelumnya tersedia 133 tempat tidur menjadi 180 tempat tidur. Demikian pula halnya dengan RS Bhayangkara Tulungagung yang juga telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 oleh Gubernur Jawa Timur. Dengan total kapasitas pelayanan medis khusus COVID-19 secara keseluruhan berjumlah 452 tempat tidur, para pengambil kebijakan dari masing-masing lembaga/instansi dan unit-unit layanan kesehatan lebih mudah berkoordinasi saat muncul kasus baru yang membutuhkan pelayanan rawat inap (Sujarwoko, 2021).

Pendekatan *Citizen Centric*

Warga negara (*citizen*) memegang peranan yang amat penting dalam agile governance. Penerapan citizen centric approach dalam penyusunan standar pelayanan harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah menyusun strategi untuk menguasai perubahan dan ketidakpastian (Shah & Stephens, 2005). Dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah tidak dapat menanganinya sendiri, pastinya butuh akan dukungan dari masyarakat. Dalam penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui Satgas



Penanganan Covid-19. Dalam mencari pilihan solusi atau alternatif kebijakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung juga dibantu berbagai organisasi, seperti halnya organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi rumah sakit-rumah sakit swasta, klinik-klinik swasta. Bahkan dari swasta dan masyarakat yang berkecukupan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung khususnya SDM yang menangani Covid-19 juga mendapatkan bantuan seperti halnya APD, konsumsi, dan sumbangan-sumbangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan organisasi-organisasi masyarakat bersama-sama tidak berhenti dalam hal edukasi akan pentingnya protokol kesehatan. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan juga melakukan edukasi yang dilakukan melalui ledang untuk mengajak masyarakat menerapkan 3M (Menekan, Mencegah, memutus Rantai) maupun 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) bersama Puskesmas setempat. Semua unsur yang bekerjasama dalam pencegahan Covid-19 melakukan edukasi melalui lenflet, pamflet, poster, siaran radio, Tv, siaran Diskominfo, selebaran bahkan baliho dijalan-jalan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga ikut menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro walau sebenarnya tidak masuk daftar daerah yang wajib menerapkan PPKM mikro, tapi pemerintah memutuskan tetap menjalankan agar dapat menekan angka kasus Covid-19 (Agriesta, 2021). Pemerintah juga membentuk posko dan Satgas penanganan Covid-19 di tingkat desa, dimana unsur-unsur SDMnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga memberikan simbol dari setiap Rukun Tetangga jika terdapat kasus Covid-19 diwilayahnya. Jika di suatu Rukun Tetangga (RT) terdapat 1-5 rumah terdapat kasus Covid-19 maka RT tersebut diberikan bendera warna kuning sebagai tanda zona kuning. Lalu, diterapkan pelacakan riwayat kontak dan isolasi mandiri. Kemudian jika wilayah itu menjadi zona oranye dengan tanda bendera oranye berarti terdapat 6-10 rumah yang memiliki kasus positif Covid-19. Kebijakan yang diambil sama seperti zona kuning, namun ditambah dengan menutup tempat ibadah dan tempat bermain anak. Terakhir, wilayah itu ditetapkan sebagai zona merah dengan diberi tanda bendera merah jika lebih dari 10 terdapat kasus positif Covid-19.

Terkait tempat karantina Rusunawa IAIN Tulungagung, bukan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang memintanya, melainkan dari pihak IAIN Tulungagung sendiri yang menawarkan secara sukarela tempat untuk karantina pasien Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi tersebut.

Investasi SDM

Dalam penanganan Covid-19 banyak SDM yang terlibat dalam prosesnya, baik mulai dari Pemerintah, Swasta, Masyarakat, dan berbagai organisasi masyarakat. Dalam penanganan pasien Covid-19 tidak ada rekrutmen tenaga kesehatan didalamnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memaksimalkan SDM yang ada, namun dari BBTCLPP (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit) yang merupakan salah 1 UPT Kementerian Kesehatan yang ada di Surabaya memberikan 2 bantuan tenaga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Dalam penanganan Covid-19 terutama yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19, tidak hanya orang-orang dari tenaga kesehatan saja yang tergabung didalamnya, lintas OPDpun ikut berperan aktif membantu dalam menangani Covid-19. Seperti halnya sosialisasi dan edukasi dibantu oleh diskominfo, kepatuhan pada aturan yang ada dibantu Satpol PP, Polres dan Kodim, perencanaan dibantu Bappeda, keuangan dibantu dengan BPKAD, terkait 3T dari Dinas Kesehatan dan Pengobatan dari Rumah Sakit dan Satgas Penanganan Covid-19 dipimpin oleh BPBD.

Untuk menunjang kemampuan dan pengetahuan SDM pelaksana penanganan Covid-19 dilakukan pelatihan, baik melalui webinar tingkat regional maupun tingkat nasional ataupun pelatihan langsung. Covid-19 ini merupakan penyakit baru, bagaimana cara penanganan, alat yang digunakan untuk menangani akan diberitahukan melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Di gedung karantina Rusunawa yang dipinjam oleh IAIN Tulungagung dan Rusuwa (Rumah Susun Sewa) yang ada di Kelurahan Jepun ada yang menjaga selama 24 jam. SDM Puskesmas yang mengampu Rusunawa IAIN Tulungagung dan Rusuwa tersebut dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Dan tidak hanya yang bertugas di Rusunawa IAIN Tulungagung dan Rusuwa Jepun, seluruh SDM Puskesmas diberikan pelatihan terkait penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan perekrutan 39 anak muda yang dijadikan relawan. Mereka akan membantu kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Tulungagung yang saat ini namanya menjadi Satgas Penanganan Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat. 39 anak muda tersebut diantaranya adalah dari PMII, BEM di Tulungagung, Tagana serta komunitas lain. Sebagai relawan yang sudah diakui, mereka juga akan mendapatkan insentif sesuai kinerja masing-masing. Salah satu tugas dari para relawan adalah memberi pendampingan dan edukasi pada lingkungan mantan pasien Covid-19 (Yohanes, 2020). Karena biasanya orang-orang yang sudah sembuh masih mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya. Edukasi lainnya yang dilakukan relawan ini adalah melakukan penguatan protokol kesehatan di masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung merespon cepat terhadap penanganan COVID-19 dan dapat berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam konsep *Agile Governance*. Pertama, Dinas Kesehatan dapat merumuskan *value proposition* yang diwujudkan dengan metode *agile* dan melakukan *agility shift*, dengan mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru yang lebih terbuka dan responsif seperti yang dikatakan oleh (Dhir & Sushil, 2018). Dinas Kesehatan memiliki strategi efektif, adaptif, kolaboratif dan responsif dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Kesiapsiagaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan menegaskan agar tetap waspada. Selain melakukan deteksi dini melalui klinik, rumah sakit serta jaringan puskesmas yang ada di tingkat desa dan kecamatan, pengawasan juga akan dilakukan bagi warga pendatang yang barusan bepergian dari negara-negara yang telah dinyatakan menjadi sebaran Virus Covid-19.

Kedua, sebelum terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan tim epidemiologinya telah membaca tanda-tanda yang muncul sejak awal kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan ketika kondisi lingkungan yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Berawal dari prediksi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung beserta tim epidemiologinya, dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Tulungagung melakukan upaya-upaya pencegahan ataupun penanganan cepat jika terjadi lonjakan. Ketiga, warga negara (*citizen*) memegang peranan yang amat penting dalam kebijakan publik yang *agile* (Purwanto, 2019). Dalam penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui Satgas Penanganan Covid-19. Dalam mencari pilihan solusi atau alternatif kebijakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung juga bekerjasama dengan berbagai organisasi, seperti halnya organisasi keagamaan, sosial, rumah sakit swasta dan klinik-klinik swasta. Keempat, untuk menunjang kemampuan dan pengetahuan SDM pelaksana penanganan Covid-19 dilakukan pelatihan, baik melalui webinar tingkat regional dan tingkat nasional maupun pelatihan langsung. Petugas maupun relawan yang berperan dalam Penanganan Covid-19 juga mendapatkan insentif dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriesta, D. (2021). Tulungagung Ikut Terapkan PPKM Mikro, Ini Upaya yang Dilakukan untuk Tekan Covid-19. Retrieved February 9, 2021, from kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2021/02/09/23483261/tulungagung-ikut-terapkan-ppkm-mikro-ini-upaya-yang-dilakukan-untuk-tekan>
- Amalia, S. (2020). Melalui Pandemi Dengan Organisasi Dan Kebijakan Publik Yang Agile. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(1), 2018-2020. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i1.678>
- Amryudin, A. D. K., & Riris, Ka. (2020). *BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19*. XII(9).
- CNN, I. (2020). Pasien Covid-19 Melonjak, Lokasi Karantina Penuh. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/tv/20201207225222-407-579140/video-pasien-covid-19-melonjak-lokasi-karantina-penuh>
- Dhir, S., & Sushil. (2018). *Flexible Strategies in VUCA Markets*. Singapura: Springer.



- Firhansyah, M. (2021). Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik Propartif. Retrieved February 15, 2021, from Ombudsman RI website: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agile-governance-dalam-perspektif-pelayanan-publik-propartif>
- Hardani, Andriana, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., ... Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.; H. Abadi, Ed.). <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Liputan 6. (2020). Antisipasi Pemkab Tulungagung Hadapi Potensi Virus Corona. Retrieved January 17, 2020, from liputan6.com website: <https://surabaya.liputan6.com/read/4164441/antisipasi-pemkab-tulungagung-hadapi-potensi-virus-corona>
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., Pedrosa, M. L. G. do E., Neto, H. R. de A., & Moura, M. H. P. de. (2014). State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 6(5), 121–141. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>
- Pratama, A. P., Purwanti, S., & Wibowo, S. E. (2018). Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Samarinda. *Jurnal Komunikasi Pemasaran*, 6(1), 298–310.
- Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Persaingan Di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). *UGM*, 24.
- Sujarwoko, D. H. (2021). Strategi Satgas Tulungagung menekan laju sebaran COVID-19 (1). Retrieved January 30, 2021, from AntaraNews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/1975695/strategi-satgas-tulungagung-menekan-laju-sebaran-covid-19-1>
- Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia* (1st ed.). Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Yohanes, D. (2020). Pemkab Tulungagung Rekrut Anak Muda Jadi Relawan Penanggulangan Covid-19. Retrieved September 9, 2020, from Surya.co.id website: <https://surabaya.tribunnews.com/2020/09/09/pemkab-tulungagung-rekrut-anak-muda-jadi-relawan-penanggulangan-covid-19?page=2>